

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kesesuaian standar satuan harga barang dan standar biaya dalam penganggaran kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor antar perangkat daerah di Kabupaten Pesisir Selatan masih beragam.
2. Tingkat kesesuaian Standar Satuan Harga Barang tahun 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900.5/501/Kpts/BPT-PS/2016, dengan DPPA kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tahun 2017 disimpulkan bahwa terdapat 2 perangkat daerah yang memiliki tingkat kesesuaian sangat tinggi yaitu Kecamatan Silaut dan Badan Kepegawaian Daerah, selain itu terdapat 8 Perangkat daerah yang memiliki tingkat kesesuaian rendah dan 7 perangkat daerah lainnya memiliki tingkat kesesuaian sangat rendah.
3. Tingkat kesesuaian Standar Biaya tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2016, dengan DPPA kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 perangkat daerah yang memiliki tingkat kesesuaian tinggi yaitu Badan Pendapatan Daerah, sedangkan 15 perangkat daerah lainnya memiliki tingkat kesesuaian sangat rendah. Dari sisi jumlah anggaran yang diperkenankan oleh kedua peraturan tersebut, rata-rata perangkat daerah tidak menggunakan harga ataupun biaya penunjang tertinggi untuk penganggaran belanja modal.
4. Persamaan regresi linear sederhana untuk model ASB ke 1 kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor adalah $Y = 1.123.345 + 0,008X$, hal ini berarti bahwa belanja tetap untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.1.123.345 dan belanja variabelnya sebesar Rp. 0,008 kali nilai belanja

modalnya. sedangkan Persamaan regresi linear sederhana untuk model ASB ke 2 kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor adalah $Y = 1.264.089 + 0,022X$, yang berarti bahwa belanja tetap kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.1.264.089 dan belanja variabelnya sebesar Rp.0,022 kali nilai belanja modalnya.

5. Pembuatan model ASB dengan penyesuaian pada Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900.5/501/Kpts/BPT-PS/2016 tentang Standar Satuan Harga Barang tahun 2017 dan Standar Biaya berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 27 Tahun 2016 menghasilkan model yang lebih baik dibandingkan dengan model ASB dengan data DPPA tahun 2017, karena memiliki deviasi standar yang lebih rendah, artinya data dengan penyesuaian pada SSHB dan standar biaya memiliki tingkat keragaman yang rendah. Adapun standar deviasi model ASB ke 2 tersebut adalah 829.300. Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa standar satuan harga barang dan standar biaya memiliki peran yang baik dalam pembuatan model ASB.

B. Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa dari hasil penelitian ini masih jauh dari kemampuan dan memiliki keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil yang diinginkan, oleh karena itu keterbatasan ini diharapkan lebih bisa diperhatikan untuk peneliti-peneliti dimasa datang. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pada penelitian ini terdapat harga tipe/jenis barang yang dianggarkan dalam kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, yang tidak diatur dalam Keputusan Bupati No. 900.5/501/Kpts/BPT-PS/2016 tentang Standar Satuan Harga Barang tahun 2017 sehingga nilai persentase kesesuaiannya menghasilkan formula $\frac{0}{0}$, akibatnya nilai kesesuaian jenis barang tersebut tidak dapat dihitung dan dikeluarkan dari analisis rata-rata persentase kesesuaian pada masing-masing perangkat daerah.

C. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan beberapa saran yaitu:

1. Dari hasil analisis kesesuaian Standar Satuan Harga Barang Tahun 2017, mayoritas perangkat daerah yang tidak menganggarkan tiap jenis barang sesuai Standar Satuan Harga Barang yang telah ditetapkan, sebaiknya tim penyusun Standar Satuan Harga Barang, perlu melakukan pengkajian/evaluasi terus menerus atas beragamnya jenis kebutuhan barang yang akan diadakan pada tiap-tiap perangkat daerah pada tahun berikutnya, serta merevisi buku Standar Satuan Harga Barang tersebut jika menerima usulan baru dari perangkat daerah terhadap kebutuhan tipe atau jenis barang baru yang belum terakomodir tentunya ditunjang dengan ketersediaan waktu, SDM dan anggaran yang memadai.
2. Pemerintah Daerah Pesisir Selatan diharapkan agar dapat segera menyusun dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) masing-masing perangkat daerah, sehingga saat penyusunan anggaran terkait dengan penganggaran tiap jenis barang sudah mencerminkan apakah barang tersebut merupakan kebutuhan riil barang milik daerah pada Perangkat Daerah atau tidak, dan diketahui pencapaian tujuan atas pengadaan barang tersebut.
3. Sedangkan dari hasil analisis kesesuaian Standar Biaya Tahun 2017, sebaiknya dalam menyusun buku Standar Biaya tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga diharapkan standar biaya yang ada dapat memenuhi komponen-komponen biaya yang dibutuhkan oleh masing-masing perangkat daerah dengan tetap mempertimbangkan azas efektifitas dan kemampuan keuangan daerah.
4. Selain itu untuk dapat melakukan kerjasama lebih lanjut dengan pengembang aplikasi SIPKD yang dipergunakan saat ini, agar seluruh standar biaya akan dapat diintegrasikan dengan sistim aplikasi yang digunakan, hal ini sekaligus meminalisir keragaman data saat pengentrian data RKA.

5. Model ASB untuk kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dengan penyesuaian anggaran menurut standar satuan harga barang dan standar biaya (ASB model ke-2) dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya. Dengan menghitung besaran total belanja untuk kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dengan menggunakan persamaan regresi yang ada pada model Analisis Standar Belanja (ASB) diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan anggaran pemerintah daerah.